

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

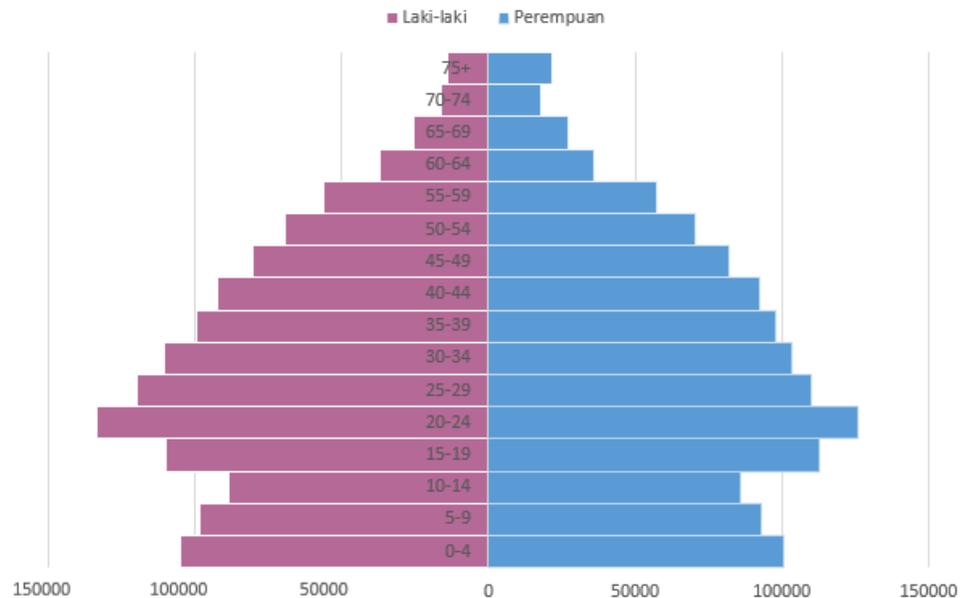
Bandung merupakan ibu kota dari provinsi Jawa Barat yang secara geografis terletak ditengah Provinsi Jawa Barat. Bandung sangat dikenal dengan sebutan kota belanja yang banyak dipenuhi dengan mall dan *factory outlet*, bukan hanya itu sampai saat ini Bandung juga terkenal dengan sebutan kota wisata kuliner. Bandung menjadi salah satu kota tujuan wisata dan pendidikan bagi pendatang luar maupun yang berasal dari Bandung sendiri. Kota Bandung memiliki 30 kecamatan dan 153 kelurahan, yang didominasi oleh penduduk yang berusia produktif (BPS Kota Bandung, 2016). Menurut BPS Kota Bandung yang dikatakan usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun. Berikut data dari BPS Kota Bandung (2016) mengenai jumlah penduduk, sebagai berikut:

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total	%
0 – 14	292.109	279.552	571.661	22,95%
15 – 64	909.550	887.456	1.797.006	72,15%
65 +	55.517	66.438	121.955	4,90%
Total	1.257.176	1.233.446	2.490.622	100%

Tabel 1.1 Penduduk Kota Bandung Menurut Kelompok Umur Tahun 2016

(Sumber: Data Diolah, Badan Pusat Statistik Kota Bandung 2017)

Berdasarkan tabel 1.1 total penduduk usia produktif mencapai 72.15% yang hampir mendominasi keseluruhan penduduk di Kota Bandung. Dapat dilihat berdasarkan data BPS Kota Bandung, piramida penduduk Kota Bandung 2016 sebagai berikut:



Gambar 1.1 Grafik Piramida Penduduk Kota Bandung 2016

(Sumber: Data Diolah, Badan Pusat Statistik Kota Bandung 2017)

Berdasarkan gambar 1.1 terlihat bentuk piramida penduduk Kota Bandung dimana dari seluruh jumlah penduduk Kota Bandung, yang mendominasi adalah penduduk usia produktif terutama usia muda. Itulah yang menjadi salah satu penyebab Bandung terkenal dengan tingkat konsumtifnya yang tinggi karena banyak usia produktif yang menjadikan Kota Bandung sebagai tujuan dalam menuntut ilmu, belanja, wisata, hingga kuliner (mediatataruang.com, 2016).

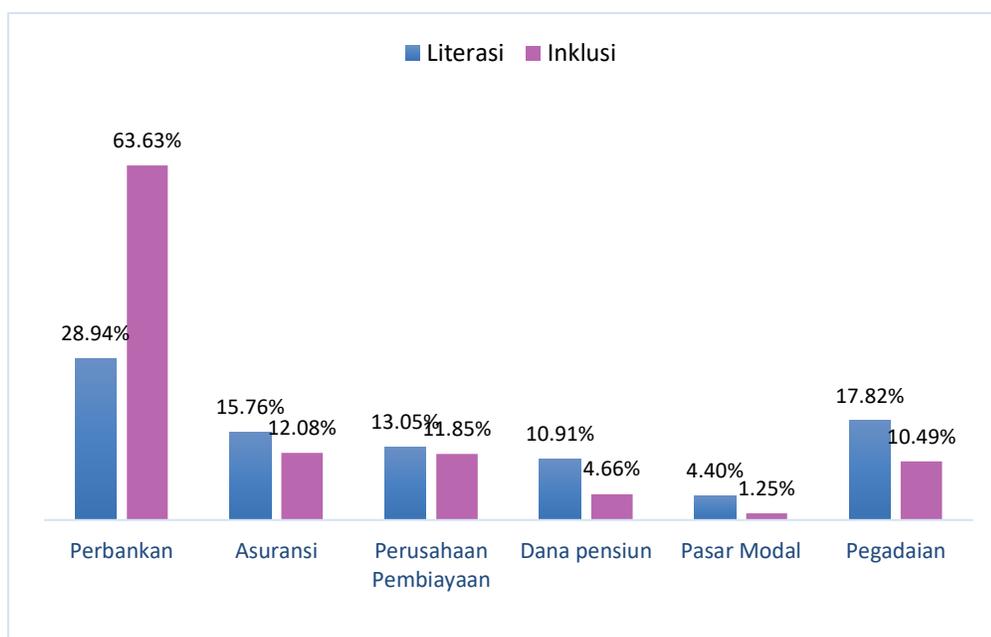
1.2 Latar Belakang Masalah

Dinamika sektor keuangan telah menjadi faktor pendukung aktifitas ekonomi maupun sosial dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Didukung pula dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi yang menjadikan akses keuangan dapat terintegrasi secara global dan dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat (Braunstein & Welch, 2002). Pentingnya literasi keuangan dan inklusi keuangan dikemukakan oleh Atkinson dan Messy (2013) bahwa literasi keuangan dan

inklusi keuangan merupakan pilar yang sangat berperan penting dalam memperkuat layanan jasa keuangan. Salah satu kendala yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya untuk mengakses sektor jasa keuangan adalah karena kurangnya pengetahuan dan informasi ataupun dikarenakan masih mahalnya produk dan layanan yang tersedia.

Layanan jasa keuangan memiliki peran penting dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara global. Menurut Chen dan Volpe (1998) literasi keuangan adalah kemampuan mengelola keuangan agar hidup bisa lebih sejahtera dimasa yang akan datang, sedangkan inklusi keuangan adalah suatu keadaan dimana mayoritas masyarakat dapat memanfaatkan jasa keuangan yang tersedia sehingga dapat meminimalisir adanya kelompok masyarakat yang belum sadar akan manfaat dari penggunaan jasa dari industri keuangan (*Global Financial Development Report*, 2014). Dengan kata lain, literasi keuangan memiliki hubungan dengan inklusi keuangan karena jika seseorang memiliki pengetahuan tentang keuangan maka orang tersebut sadar akan manfaat dan menggunakan jasa dari industri keuangan (Bongomin *et al.*, 2016)

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Indonesia yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2016 menunjukkan tingkat literasi keuangan sebesar 29,66% dan tingkat inklusi keuangan sebesar 67,82%. Berikut data literasi keuangan dan inklusi keuangan pada berbagai industri keuangan di Indonesia, untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut:

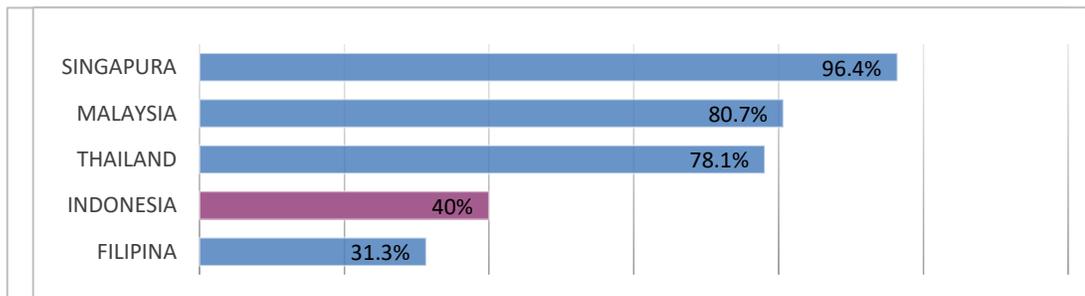


Gambar 1.2 Grafik Tingkat Literasi dan Tingkat Inklusi Berbagai Industri Keuangan di Indonesia Tahun 2016

(Sumber: Data Diolah, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016)

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia paling tinggi berada pada industri perbankan sebesar 28,94% dan 63,63%, sedangkan paling rendah berada pada industri pasar modal sebesar 4,40% dan 1,25%. Dapat disimpulkan bahwa keberagaman penggunaan produk keuangan di masyarakat Indonesia masih belum merata pada setiap sektor jasa keuangan. *Forum organization for economic co-operation development (OECD)* menetapkan bahwa untuk memperkuat sistem keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan integrasi antara inklusi keuangan, literasi keuangan dan perlindungan konsumen. Inklusi keuangan dan literasi keuangan telah menjadi program pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Lembaga Jasa Keuangan memiliki tujuan untuk mendorong sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan agar target indeks inklusi keuangan yang dicanangkan pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebesar 75% dapat tercapai pada tahun 2019.

Minimnya tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia menyebabkan Indonesia berada di posisi rendah dibandingkan 5 anggota negara ASEAN (Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia dan Filipina). Berdasarkan data dari Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) OJK Tahun 2015-2019 akses masyarakat Indonesia terhadap keuangan formal dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya, adalah sebagai berikut:



Gambar 1.3 Grafik Akses Masyarakat Terhadap Keuangan Formal Tahun 2015

(Sumber: Data Diolah, MPSJKI OJK 2015-2019)

Berdasarkan gambar 1.3 tingkat akses masyarakat terhadap keuangan formal Filipina sebesar 31,3%, Indonesia sebesar 40%, Thailand sebesar 78,1%, Malaysia sebesar 80,7%, dan Singapura sebesar 96,4%. Menunjukkan kurangnya akses masyarakat Indonesia terhadap keuangan formal menyebabkan tingkat inklusi keuangan Indonesia menempati urutan kedua terendah diantara negara ASEAN khususnya dibawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Menurut MPSJKI OJK (2015-2019) hal tersebut disebabkan oleh masyarakat Indonesia yang masih mengandalkan lembaga non-keuangan sebagai sumber pendanaan. Populasi Indonesia merupakan populasi yang terbesar keempat di dunia dan terbesar di ASEAN, sampai dua dekade yang akan datang jumlah penduduk ini akan didominasi oleh usia produktif. Besarnya penduduk usia produktif yang semakin terpelajar dan paham teknologi merupakan modal untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan (MPSJKI OJK, 2015-2019).

Survei yang dilakukan Global Findex (2014) menunjukkan bahwa jumlah penduduk dewasa, khususnya usia produktif di atas 15 tahun yang mempunyai akun di berbagai macam lembaga keuangan hanya sebesar 35,9%. Hal tersebut menandakan akses masyarakat Indonesia terhadap layanan keuangan masih relatif rendah, oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan tingkat literasi keuangan penduduk usia produktif (15-64 tahun) bertambah menjadi 3,1 juta jiwa hingga akhir tahun 2015, jumlah itu setara dengan 2% dari jumlah populasi penduduk usia produktif sebanyak 157 juta jiwa (swa.co.id, 2015).

Survei OJK pada tahun 2016 menunjukkan hanya 28,9% penduduk dewasa yang memahami produk-produk perbankan, angka tersebut masih sangat jauh dari target pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan sebesar 75% (okezone.com, 2017). Oleh karena itulah, OJK berfokus terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan pada usia produktif yang didominasi oleh usia muda, dengan melakukan edukasi kepada pelajar dan mengenalkan pentingnya pengetahuan tentang jasa keuangan serta mulai memanfaatkan jasa keuangan dari usia sekolah dengan menabung dan berinvestasi, sehingga dapat membentuk *financial habit* sejak dini (OJK, 2015a:9). Menurut OJK (2015a:39) masyarakat usia produktif seharusnya berusaha menyisihkan penghasilan untuk kesejahteraan di masa depan ketika mereka pensiun, namun seringkali mereka lupa bahwa masa yang paling menantang adalah ketika mereka memasuki masa pensiun nanti, dimana mereka sudah tidak lagi memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi berbagai kebutuhan di masa tua yang tidak kalah besar dibanding pada saat mereka masih berusia produktif, seperti biaya hidup dan juga biaya kesehatan.

Berdasarkan Laporan Kinerja OJK (2016:3), OJK selama ini telah bekerjasama dengan pemerintah dan industri jasa keuangan untuk mendorong peran sektor jasa keuangan agar lebih inklusif, diantaranya adalah:

- 1) Program Tabungan Simpanan Pelajar (SIMPEL)
- 2) Program Layanan Keuangan Mikro (Laku Mikro)

- 3) Program Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)
- 4) Kampanye Masif Untuk meningkatkan Jumlah Investor Pasar Modal Domestik
- 5) Peluncuran Program Galeri Investasi *Mobile*
- 6) Penyelenggaraan Keuangan Syariah Fair 2016
- 7) Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Di 45 Provinsi/Kabupaten/Kota Serta Penerbitan Buku Mengenal Jasa keuangan Tingkat Perguruan Tinggi.

Program-program yang telah direncanakan dan diimplementasikan sampai saat ini belum memiliki dampak yang signifikan karena berdasarkan gambar 1.3 tingkat literasi dan tingkat inklusi di Indonesia masih berada dibawah jika dibandingkan dengan 5 negara ASEAN, terutama Singapore yang sudah mencapai 90% (harian nasional, 2017). Hal inilah yang harus menjadi perhatian serius bagi OJK karena pemahaman keuangan seseorang tentang literasi keuangan saja belum cukup dalam meningkatkan akses orang tersebut terhadap penggunaan lembaga keuangan, sehingga dapat bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait lainnya, salah satunya adalah dengan modal sosial.

Menurut Fukuyama (2000) bahwa modal sosial didefinisikan sebagai rangkaian nilai atau norma informal yang dimiliki bersama antara para anggotanya dalam suatu masyarakat sehingga memungkinkan terjalannya kerjasama, artinya modal sosial yang dalam konteks ini didasarkan pada komponen *reciprocity*, *norms*, *trust* dan *network*. Dengan demikian, akan dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan secara perlahan di masyarakat, modal sosial sebagai suatu dimensi yang dibangun berdasarkan nilai, kultur, persepsi, institusi serta mekanisme dalam kegiatan positif sebagai sarana pemberdayaan terhadap sesama masyarakat. Dusuki (2008) menyatakan bahwa modal sosial mampu menciptakan “aset informasi”, yang bertindak sebagai dukungan kolektif karakter yang masing-masing anggota kelompok memberikan yang lain, yang akan dengan mudah diterima oleh perantara keuangan sebagai pengganti aset lainnya. Ledgerwood (1999) berbagi pandangan yang sama dan mengamati bahwa ikatan sosial dan aset informasi yang dibuat mampu meningkatkan kesadaran jasa keuangan dan jaminan sosial, yang merupakan penentu dari

akses ke layanan keuangan dalam industri lembaga keuangan mikro. Salah satu modal sosial yang dapat membantu meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan adalah kelompok usia produktif.

Berdasarkan data dari BPS Kota Bandung (2016) jumlah penduduk usia produktif di Kota Bandung tahun 2015 mencapai 72,04% dari populasi penduduknya, hal ini dikarenakan Kota Bandung menjadi salah satu kota tujuan pelajar dan mahasiswa dalam menuntut ilmu. Kota Bandung merupakan salah satu kota besar yang memiliki peran penting dalam perekonomian Jawa Barat, nasional, bahkan internasional (kompasiana.com, 2017). Berdasarkan data dari BPS Kota Bandung (2016), menunjukkan bahwa rasio ketergantungan (*dependency ratio*) pada tahun 2015 sebesar 38,80%, yang berarti dari 100 jiwa penduduk usia produktif di Kota Bandung harus menanggung 39 jiwa penduduk non-produktif. Semakin tinggi *dependency ratio* menunjukkan bahwa semakin tingginya beban yang harus ditanggung usia produktif terhadap keberlangsungan hidup usia yang belum produktif dan yang akan non-produktif, maka sangat dikhawatirkan khususnya dalam beberapa tahun kedepan usia produktif akan menanggung beban yang besar apalagi jika mereka tidak bisa meninggalkan sikap boros dan menghambur-hamburkan uang.

Meningkatnya pendapatan tidak membuat masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Bandung menjadi suka menabung, gaya hidup yang semakin tinggi membuat masyarakat lebih senang mengkonsumsi daripada menabung ketika memiliki uang (Yuningsih *et al.*, 2017). Menurut Yuningsih *et al.*, (2017) hal tersebut dapat terlihat dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak sebanding dengan dana simpanan yang ada, berikut adalah data dari BPS Kota Bandung dalam Angka (2016) yaitu PDRB Kota Bandung sebesar Rp.195.808.995.000.000 sedangkan dana simpanan Kota Bandung sebesar Rp.97.171.839.000.000. Terlihat bahwa nilai PDRB Kota Bandung lebih tinggi daripada dana simpanan yang ada, hal tersebut menjadi salah satu pemicu literasi keuangan menjadi rendah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa gaya hidup masyarakat Bandung cenderung lebih konsumtif dibandingkan menabung dan berinvestasi dalam produk jasa keuangan (mediatataruang.com, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Nurasyiah (2011) yang menyatakan bahwa siswa SMA di Kota Bandung pengeluaran rata-rata uang dikeluarkan perbulan dari uang sakunya yaitu 61% digunakan untuk jajan, 21,26% digunakan untuk kepentingan pribadi dan kesenangan semata, 61,23% digunakan untuk kebutuhan, sedangkan hanya 0,88% digunakan untuk menabung. Chen dan Volpe (1998) mengatakan bahwa mayoritas dari usia muda memiliki tingkat literasi yang rendah karena mereka sedang berada dalam tahap yang awal pada kehidupan finansial mereka, pada tahap ini mereka memiliki masalah keuangan yang berkaitan dengan pengetahuan keuangan mereka yang minim, sehingga sebagian besar pendapatan mereka dihabiskan untuk konsumsi daripada investasi. Berdasarkan data dari KSEI (2015) jumlah investor Bandung yang tercatat di KSEI hanya menunjukkan sekitar 18 ribu orang, tidak sampai 0,7% dari jumlah penduduk Bandung. Seiring dengan terjadinya perubahan perekonomian dan globalisasi, terjadi perubahan dalam perilaku membeli pada masyarakat. Terkadang seseorang membeli sesuatu bukan didasarkan pada kebutuhan sebenarnya, melainkan dilakukan semata-mata demi kesenangan, sehingga menyebabkan seseorang menjadi boros yang dikenal dengan istilah perilaku konsumtif atau konsumerisme (Wahyudi, 2013)

Di Bandung sendiri, terdapat modal sosial yang telah dibentuk oleh OJK untuk meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan masyarakat yaitu program edukasi literasi keuangan dengan menggunakan fasilitas Si Mobil Literasi Keuangan (SiMOLEK) yang akan menyinggahi beberapa kota, salah satunya adalah Kota Bandung (tribunnews.com, 2014). Modal sosial lainnya adalah kerjasama OJK dengan Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) yang meliputi beberapa hal, yaitu rencana pembuatan Pusat Riset Literasi dan Inklusi Keuangan (PRLIK), penyelenggaraan kuliah umum secara reguler, dan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) (tribunnews.com, 2017). Dari program-program OJK diatas, terlihat bahwa sasarannya pun beragam dan tidak terspesifik. Menurut peneliti, kelompok usia produktif yang didominasi oleh usia muda patut diteliti karena tingkat literasi dan inklusi keuangannya masih tergolong rendah, padahal OJK selama ini sudah berupaya namun belum membuahkan hasil. Oleh

karena itu, usia produktif perlu menjadi perhatian karena nantinya mereka akan menanggung usia yang belum produktif dan yang akan tidak produktif lagi.

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti modal sosial adalah Bongomin *et al.* (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa modal sosial sangat berperan penting dalam memediasi hubungan antara literasi keuangan dan inklusi keuangan, terutama dalam mengakses layanan keuangan di masyarakat pedesaan Uganda. Kamukama dan Natamba (2013) dalam penelitiannya menemukan bahwa modal sosial secara parsial memediasi masyarakat untuk dapat mengakses ke layanan keuangan di Uganda. Penelitian-penelitian dahulu tersebut menjadi dasar pada penelitian ini.

Dengan demikian penulis berharap peran modal sosial menjadi sarana penghubung yang akan mendukung peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan pada masyarakat di Kota Bandung, terutama penduduk usia produktif. Dari kajian fenomena-fenomena diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“Peran Modal Sosial sebagai Mediator Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan pada Usia Produktif di Kota Bandung”**.

1.3 Perumusan Masalah

Minimnya tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia menyebabkan Indonesia berada di posisi rendah dibandingkan 5 anggota negara ASEAN khususnya Thailand, Malaysia, dan Singapura. Oleh karena itu, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfokus pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan khususnya penduduk yang berusia produktif agar target indeks inklusi keuangan yang dicanangkan pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebesar 75% dapat tercapai pada tahun 2019.

Rendahnya literasi keuangan dan inklusi keuangan masyarakat terlebih pada usia produktif perlu mendapat perhatian. Kota Bandung merupakan salah satu kota yang penduduknya didominasi oleh usia produktif yang terkenal dengan tingkat konsumtifnya yang tinggi (mediatataruang.com, 2016). Hal ini dikarenakan Kota

Bandung menjadi salah satu daerah pelajar dan mahasiswa dalam hal menuntut ilmu (BPS Kota Bandung, 2016). Modal sosial nantinya diharapkan akan menjadi mediator dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan, sehingga mampu membantu pemerintah dalam mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan khususnya pada usia produktif di Kota Bandung

1.4 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah literasi keuangan memiliki efek yang signifikan pada modal sosial?
2. Apakah modal sosial memiliki efek yang signifikan pada inklusi keuangan?
3. Apakah modal sosial memediasi hubungan antara literasi keuangan dan inklusi keuangan?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah literasi keuangan memiliki efek yang signifikan pada modal sosial
2. Untuk mengetahui apakah modal sosial memiliki efek yang signifikan pada inklusi keuangan
3. Untuk mengetahui apakah modal sosial memediasi hubungan antara literasi keuangan dan inklusi keuangan

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1.6.1 Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar dapat menjadi masukan dalam membuat program-program dimasa yang akan datang sehingga dapat meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan khususnya di Kota Bandung.

1.6.2 Aspek Akademis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengembangan dalam ilmu ekonomi dan dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian selanjutnya dengan topik yang berhubungan.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Variabel Penelitian

Variabel independen penelitian ini adalah literasi keuangan, variabel dependen atau variabel hasilnya adalah inklusi keuangan, dan variabel mediasinya adalah modal sosial. Pertanyaan dalam variabel penelitian ini disesuaikan dengan keadaan objek penelitian.

1.7.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kota Bandung, sedangkan objek penelitiannya adalah usia produktif di Kota Bandung.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penjelasan dari literatur penelitian yang berkaitan dengan teori penelitian yang mendukung solusi permasalahan, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian yang dilakukan yaitu variabel, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis data yang berfokus pada hasil olahan data sesuai dengan metode yang digunakan. Interpretasi hasil analisis dari objek penelitian sesuai dengan pengujian yang dilakukan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari analisis dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya dan saran yang diharapkan sebagai rekomendasi yang bermanfaat baik bagi objek penelitian maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan.